

# RENCANA STRATEGIS DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2005 - 2009



# PENDAHULUAN

- Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)  
*... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ...*
- Amanat Pasal 31 UUD 1945
  - (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan;
  - (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; serta
  - (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang
  - (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
  - (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
- Amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2004-2009)  
Pendidikan ditetapkan sebagai salah satu prioritas dalam agenda utama pembangunan nasional.

# PROGRAM PENGUATAN KEBIJAKAN DEPDIKNAS DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH BAPPENAS

Program Bappenas	Kegiatan Pokok Pemerintah
1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) – TK, RA, KB, TPA	8. Perluasan akses PAUD
2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun – SD, MI, SMP, MTs	1. Pendanaan biaya operasi wajar 2. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan wajar 3. Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan (program wajar) 4. Perluasan akses pendidikan wajar pada jalur nonformal 6. Perluasan akses SLB dan sekolah inklusif 7. Pengembangan sekolah wajar layanan khusus bagi daerah terpencil/kepulauan yang berpenduduk jarang dan terpencar.
3. Pendidikan Menengah	10. Perluasan akses SMA/SMK dan SMA terpadu 21. Pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal di setiap Kab/Kota 22. Pembangunan sekolah bertaraf internasional di setiap propinsi dan/atau kabupaten/kota
4. Pendidikan Tinggi	11. Perluasan akses PT 23. Mendorong jumlah jurusan di PT yang masuk dalam 100 besar Asia 24. Akselerasi jumlah program studi kejuruan, vokasi, dan profesi 25. Peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah dan HAKI
5. Pendidikan Non Formal	5. Perluasan akses pendidikan keaksaraan bagi penduduk usia >15 tahun 9. Pendidikan Keterampilan Hidup 20. Perluasan pendidikan kecakapan hidup
6. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	17. Pengembangan guru sebagai profesi 18. Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan





# PROGRAM PENGUATAN KEBIJAKAN DEPDIKNAS DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH BAPPENAS

Program Bappenas	Kegiatan Pokok Pemerintah
<b>7. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan</b>	13. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perluasan akses SMA/SMK/SM Terpadu, SLB, dan PT 14. Implementasi dan penyempurnaan SNP oleh BSNP 15. Penjaminan mutu secara terprogram dengan mengacu kepada SNP 16. Perluasan dan peningkatan mutu akreditasi
<b>8. Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	19. Perbaikan sarana dan prasarana 28. Penataan regulasi pengelolaan pendidikan 32. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola pendidikan
<b>Program-program lainnya</b> 1. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 2. Program Penelitian dan Pengembangan Iptek 3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarus-utamaan Gender dan Anak 4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 5. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan 6. Program Pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur 7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	12. Pemanfaatan ICT sebagai media pembelajaran jarak jauh 26. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan 27. Peningkatan SPI berkoordinasi dengan BPKP dan BPK 29. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat dalam perencanaan dan penganggaran 30. Peningkatan kapasitas dan kompetensi managerial aparat 31. Peningkatan ketaatan aparat pada peraturan perundang-undangan 33. Peningkatan pencitraan publik 34. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pemeriksaan aparat Itjen 35. Pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan KKN 36. Intensifikasi tindakan-tindakan preventif oleh Itjen 37. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemeriksaan oleh Itjen, BPKP, dan BPK 38. Penyelesaian tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan Itjen, BPKP, dan BPK 39. Pengembangan aplikasi SIM secara terintegrasi (Keuangan, Aset, Kepegawaian, dan data lainnya)



# DASAR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL

- A. Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009
- B. Visi Pendidikan Nasional
- C. Misi Pendidikan Nasional
- D. Tata Nilai Departemen Pendidikan Nasional



# AMANAT UNDANG-UNDANG NO 20/2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

*M*engacu pada amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tercantum bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



# PASAL 4 UU 20/2003 Tentang SISDIKNAS:

## PRINSIP-PRINSIP DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.



# TUJUAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL JANGKA MENENGAH

1. Meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia;
2. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Meningkatkan sensitifitas dan kemampuan ekspresi estetis;
4. Meningkatkan kualitas jasmani;
5. Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan bagi semua warga negara secara adil, tidak diskriminatif, dan demokratis tanpa membedakan tempat tinggal, status sosial-ekonomi, jenis kelamin, agama, kelompok etnis, dan kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual;





6. Menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun secara efisien, bermutu, dan relevan sebagai landasan yang kokoh bagi pengembangan kualitas manusia Indonesia;
7. Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk buta aksara;
8. Memperluas akses pendidikan non-formal bagi penduduk laki-laki maupun perempuan yang belum sekolah, tidak pernah sekolah, buta aksara, putus sekolah dalam dan antar jenjang serta penduduk lainnya yang ingin meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan;



9. Meningkatkan daya saing bangsa dengan menghasilkan lulusan yang mandiri, bermutu, terampil, ahli dan profesional, mampu belajar sepanjang hayat, serta memiliki kecakapan hidup yang dapat membantu dirinya dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan;
10. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan tersedianya standar pendidikan nasional dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta meningkatkan kualifikasi minimum dan sertifikasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
11. Meningkatkan relevansi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan melalui peningkatan hasil penelitian, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh perguruan tinggi serta penyebarluasan dan penerapannya pada masyarakat;



12. Menata sistem pengaturan dan pengelolaan pendidikan yang semakin efisien, produktif, dan demokratis dalam suatu tata kelola yang baik dan akuntabel;
13. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas manajemen pelayanan pendidikan melalui peningkatan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, serta efektivitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan termasuk otonomi keilmuan;
14. Mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk mewujudkan Pemerintah yang bersih dan berwibawa;



# VISI

**Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.**

**Sejalan dengan Visi Pendidikan Nasional tersebut, Depdiknas berhasrat untuk pada tahun 2025 menghasilkan:**

**INSAN INDONESIA CERDAS DAN KOMPETITIF  
(Insan Kamil / Insan Paripurna)**



# Insan Cerdas Komprehensif dan Kompetitif

Makna Insan Indonesia Cerdas Komprehensif		Makna Insan Indonesia Kompetitif	
Cerdas spiritual	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul.</li> </ul>	<b>Kompetitif</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan</li> <li>•Bersemangat juang tinggi</li> <li>•Mandiri</li> <li>•Pantang menyerah</li> <li>•Pembangun dan pembina jejaring</li> <li>•Bersahabat dengan perubahan</li> <li>•Inovatif dan menjadi agen perubahan</li> <li>•Produktif</li> <li>•Sadar mutu</li> <li>•Berorientasi global</li> <li>•Pembelajar sepanjang hayat</li> </ul>
Cerdas emosional & sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiasivitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya.</li> <li>•Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>–membina dan memupuk hubungan timbal balik;</li> <li>–demokratis;</li> <li>–empatik dan simpatik;</li> <li>–menjunjung tinggi hak asasi manusia;</li> <li>–ceria dan percaya diri;</li> <li>–menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; serta</li> <li>–berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.</li> </ul> </li> </ul>		
Cerdas intelektual	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>•Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif dan imajinatif.</li> </ul>		
Cerdas kinestetis	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil, dan trengginas.</li> <li>•Aktualisasi insan adiraga.</li> </ul>		



# MISI

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

Selaras dengan Misi Pendidikan Nasional tersebut, Depdiknas untuk tahun 2005 – 2009 menetapkan Misi sebagai berikut:  
**MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG MAMPU MEMBANGUN INSAN INDONESIA CERDAS KOMPREHENSIF DAN KOMPETITIF.**



# TATA NILAI PENGELOLAAN PENDIDIKAN

## INPUT VALUES

Nilai-nilai yang diharapkan ditemukan dalam diri setiap pegawai Depdiknas



### PENYELENGGARA DAN PENGELOLA PENDIDIKAN



1. Amanah
2. Profesional
3. Antusias dan Bermotivasi Tinggi
4. Bertanggung Jawab dan Mandiri
5. Kreatif
6. Disiplin
7. Peduli dan Menghargai orang lain
8. Belajar Sepanjang Hayat

## PROCESS VALUES

Nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam bekerja di Depdiknas, dalam rangka mencapai dan mempertahankan kondisi keunggulan



### KEPEMIMPINAN & MANAJEMEN YANG PRIMA



1. Visioner dan Berwawasan
2. Menjadi Teladan
3. Memotivasi (*Motivating*)
4. Mengilhami (*Inspiring*)
5. Memberdayakan (*Empowering*)
6. Membudayakan (*Culture-forming*)
7. Taat Azas
8. Koordinatif dan Bersinergi dalam Kerangka KerjaTim
9. Akuntabel

## OUTPUT VALUES

Nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh mereka yang berkepentingan terhadap Depdiknas



### BERORIENTASI KEPADA KEPENTINGAN PEMAKAI LAYANAN PENDIDIKAN



1. Produktif (Efektif dan Efisien)
2. Gandrung Mutu Tinggi (*Service Excellence*)
3. Dapat Dipercaya (Andal)
4. Responsif dan Aspiratif
5. Antisipatif dan Inovatif
6. Demokratis, Berkeadilan, danInklusif



# TIGA PILAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN

1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan;
3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan.



# AKSES PENDIDIKAN

Rata-rata tingkat pendidikan masyarakat masih rendah (2004)

Kelompok usia > 15 th	Rata-rata lama sekolah 7,2 th
Kelompok usia > 15 th	Yang berpendidikan SLTP 36,2%
Kelompok usia > 15 th	Yang buta aksara 9,55%

Dalam rangka penuntasan Wajib Dikdas 9 tahun, masalah perluasan akses lebih menonjol terjadi pada jenjang SMP/MTs

Tingkat partisipasi pendidikan makin rendah pada jenjang pendidikan yang makin tinggi (2004)

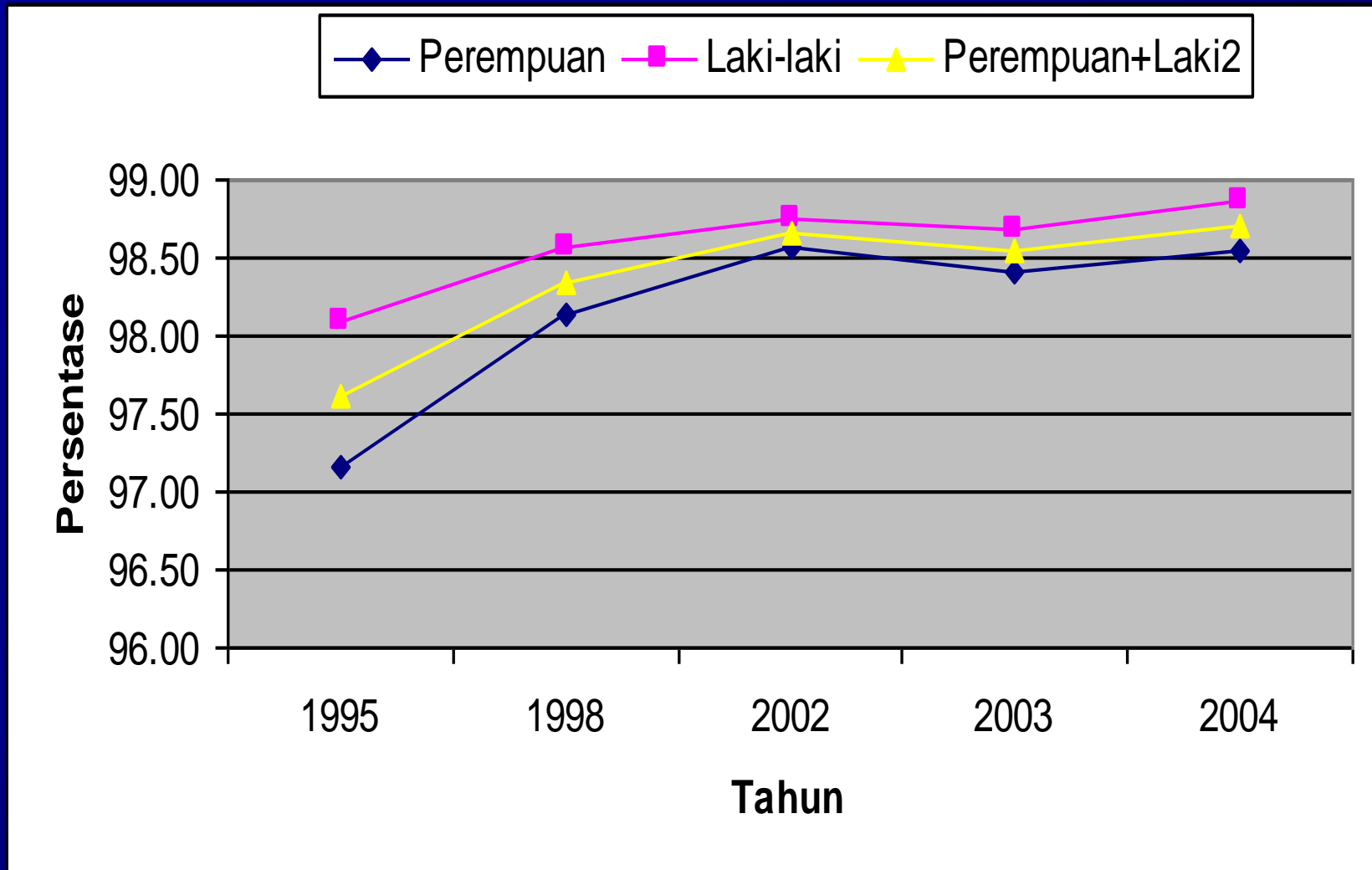
Kelompok usia 7-12 tahun	APS 96,8 %	APM 93,04 %
Kelompok usia 13-15 tahun	APS 83,5 %	APM 65,24 %
Kelompok usia SLTA	APS 53,48 %	APK 54,38 %
Pendidikan Tinggi		APK 14,26 %

# Kontribusi Sumber Kesenjangan Akses Pendidikan Antar dan Intra Provinsi

Sumber Kesenjangan		SD/ MI	SMP/ MTs	SM/ MA
APK	Antar Provinsi	30,5	29,2	27,5
	Dalam Provinsi	69,5	70,8	72,5
APM	Antar Provinsi	39,2	35,8	29,9
	Dalam Provinsi	60,8	64,2	70,1



# Tingkat Keaksaraan Penduduk Usia 15-24 Tahun 1995-2004



# MUTU PENDIDIKAN (2004)

1. Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan serta kesejahteraannya yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas,
2. Prasarana dan sarana belajar yang terbatas dan belum didayagunakan secara optimal,
3. Pendanaan pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran, serta
4. Proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif.



# KUALIFIKASI PENDIDIK

## TAHUN 2002/2003

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru	Ijazah Tertinggi				
			< D1 (%)	D2 (%)	D3 (%)	Sarjana (%)	S2/S3 (%)
1	TK	137.069	90,57	5,55	-	3,88	-
2	SLB	8.304	47,58	-	5,62	46,35	0,45
3	SD	1.234.927	49,33	40,14	2,17	8,30	0,05
4	SMP	466.748	11,23	21,33	25,10	42,03	0,31
5	SM	452.255	2,06	1,86	26,37	69,39	0,33
6	SMA	230.114	1,10	1,89	23,92	72,75	0,33
7	SMK	147.559	3,54	1,79	30,18	64,16	0,33
8	PT	236.286	-	-	-	56,54	43,46

# RASIO PENDIDIKAN TAHUN 2002/2003

No	Jenjang Pendidikan	Siswa/ Sekolah	Siswa/ Guru	Siswa/ Kelas	Kelas/ R. Kelas	Guru/ Sekolah
1	TK	39	13	20	0.97	3
2	SLB	45	4	4	1.78	10
3	SD+MI	172	20	26	1.14	8
	a. SD	177	21	26	1.13	8
	b. MI	136	16	22	1.15	9
4	SMP+MTs	307	15	39	1.00	21
	a. SMP	376	17	40	1.02	22
	b. MTs	181	11	35	0.94	17
5	SM+MA	354	13	36	1.07	27
	a. SMA	391	14	38	1.02	29
	b. MA	184	9	30	0.99	20
	c. SMK	425	14	36	1.19	30
6	PT+PTAI	1,278	15	-	-	88
	a. PT	1,267	14	-	-	91
	b. PTAI	1,518	20	-	-	78
	c. PTK	690	18	-	-	38

# GURU DAN KEPALA SEKOLAH MENURUT KELAYAKAN MENGAJAR TAHUN 2002/2003

No.	Kelayakan	Negeri	%	Swasta	%	Jumlah	%
1	SD	1,143,070	92.6	91,857	7.4	1,234,927	100.0
	a. Layak	584,395	47.3	41,315	3.3	625,710	50.7
	b. Tidak Layak	558,675	45.2	50,542	4.1	609,217	49.3
2	SMP	311,531	66.7	155,217	33.3	466,748	100.0
	a. Layak	202,720	43.4	96,385	20.7	299,105	64.1
	b. Tidak Layak	108,811	23.3	58,832	12.6	167,643	35.9
3	SMA	122,803	53.4	107,311	46.6	230,114	100.0
	a. Layak	87,379	38.0	67,051	29.1	154,430	67.1
	b. Tidak Layak	35,424	15.4	40,260	17.5	75,684	32.9
4	SMK	48,645	33.0	98,914	67.0	147,559	100.0
	a. Layak	27,967	19.0	55,631	37.7	83,598	56.7
	b. Tidak Layak	20,678	14.0	43,283	29.3	63,961	43.3

Sumber: PDIP – Balitbang, 2004

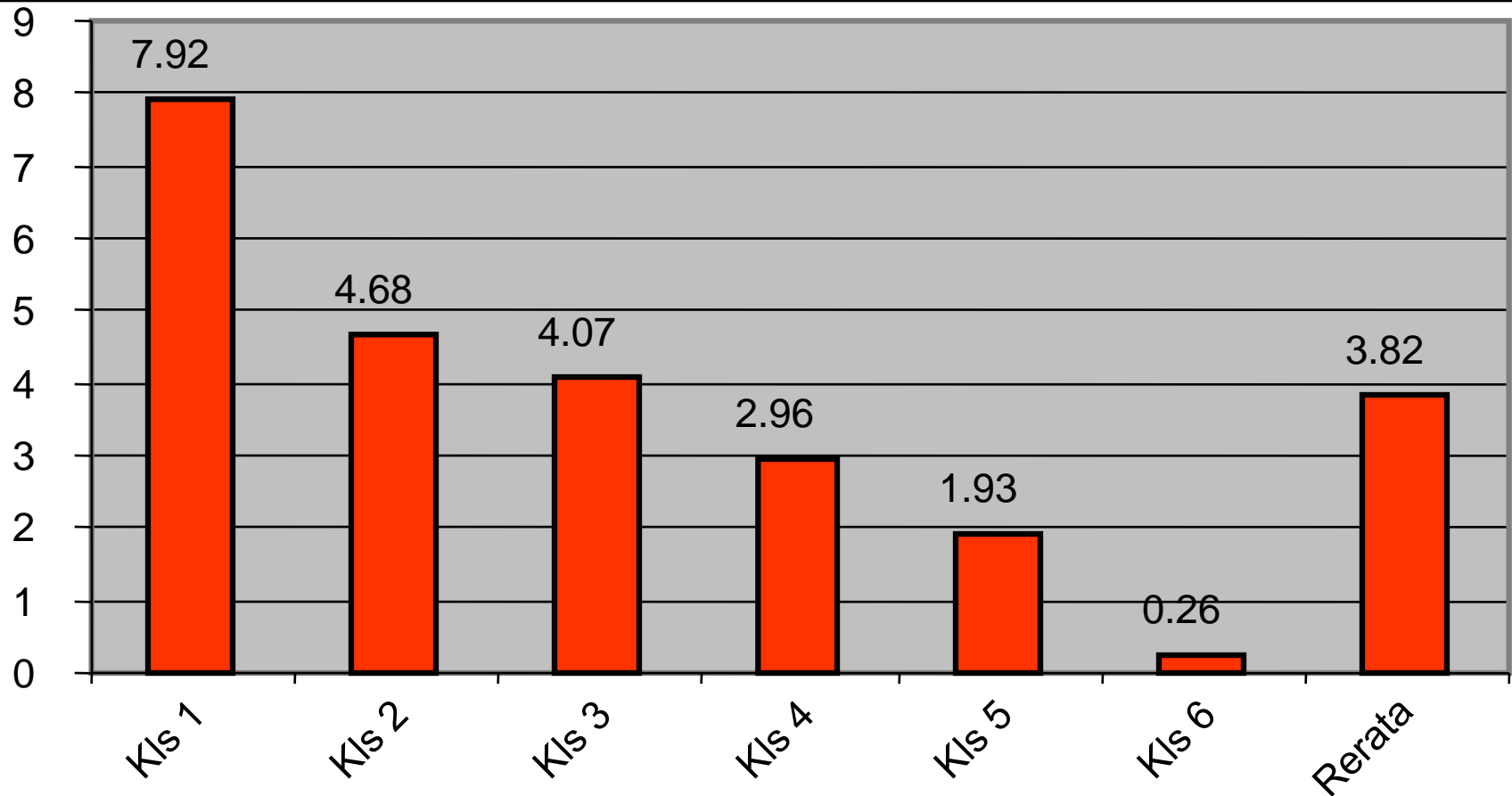


# KONDISI RUANG BELAJAR TAHUN 2003

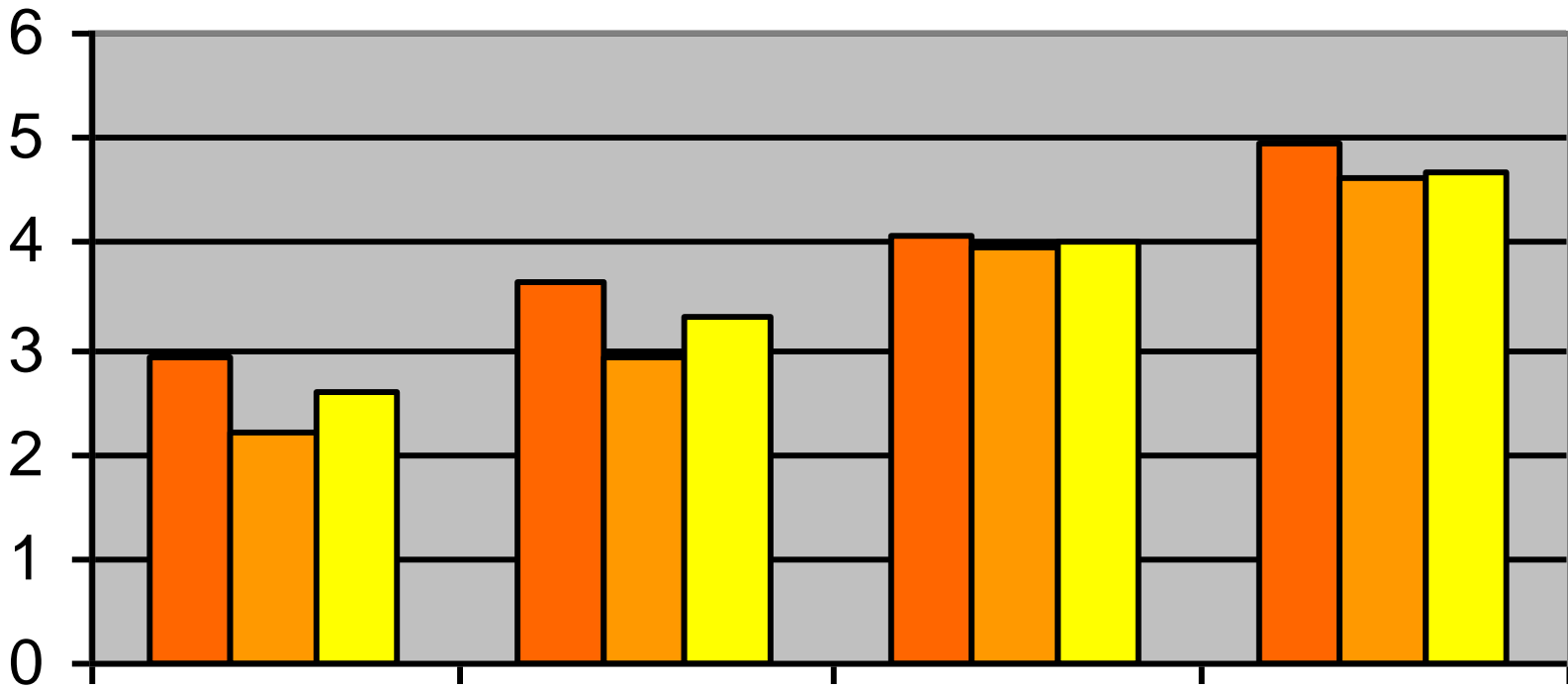
No	Bangunan/ Gedung	Kondisi Bangunan Ruang Belajar						Jumlah
		Layak pakai	%	Rusak Berat	%	Rusak Ringan	%	
1	SD	364.440	42,12	201.237	23,26	299.581	34,62	865.258
2	SMP	155.283	82,29	9.599	5,12	23.598	12,59	187.480
3	SMA	72.408	92,34	1.588	2,03	4.416	5,63	78.412
4	SMK	89.507	92,00	2.919	3,00	4.864	5,00	97.290

*Sumber: Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang Depdiknas (2003)*

# ANGKA MENGULANG KELAS SD MENURUT TINGKAT, TAHUN 2004



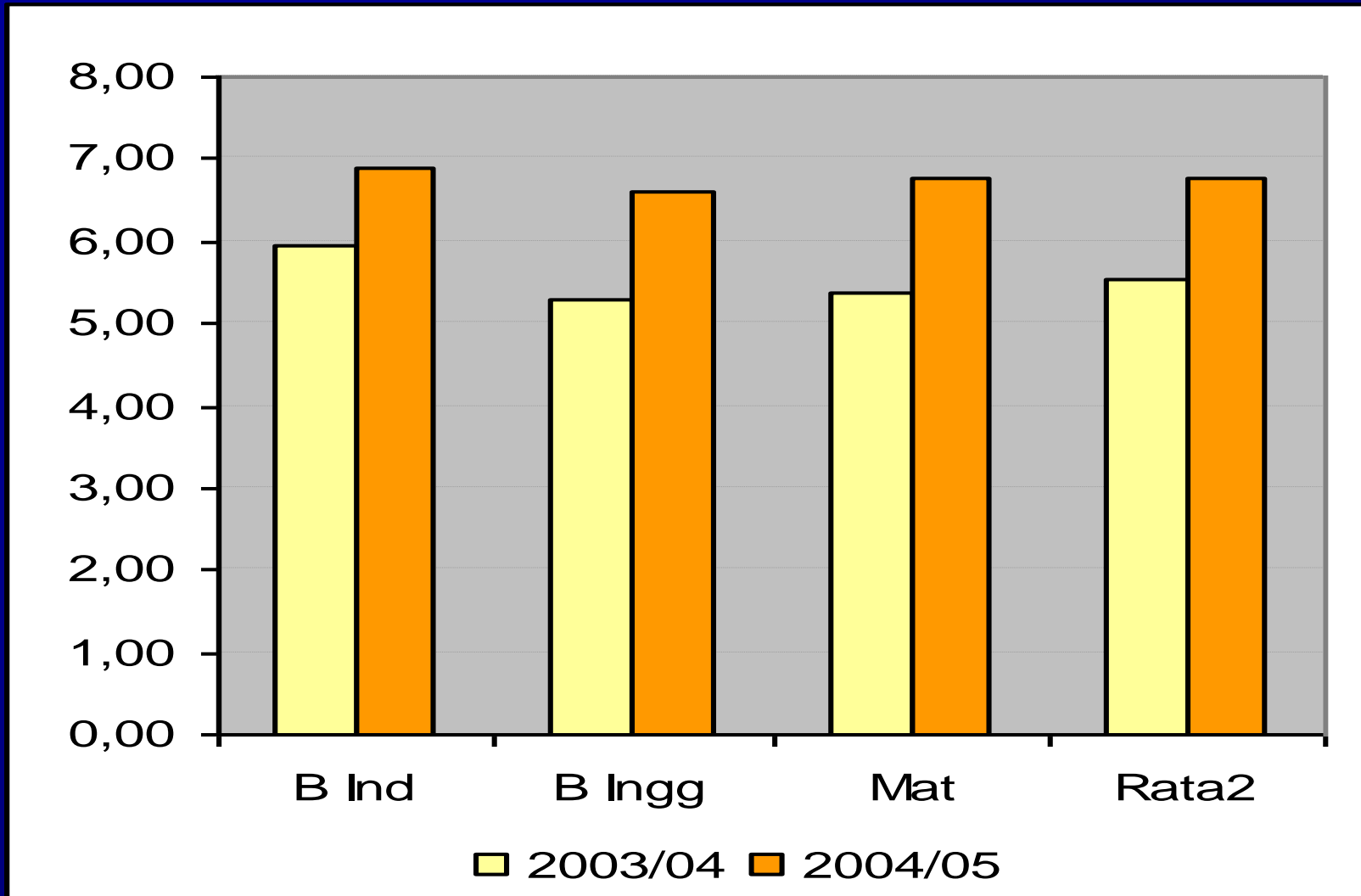
# ANGKA PUTUS SEKOLAH MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2004



■ Laki-laki ■ Perempuan ■ Rerata



# Nilai Ujian Nasional SMA Program IPA Tahun 2003/04 dan 2004/05



# TATA KELOLA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL (2004)

1. Desentralisasi bidang pendidikan.
2. Belum didukung oleh data dan informasi yang akurat pada berbagai tingkatan pemerintahan.
3. Pentingnya pengawasan terhadap berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan upaya pemerataan dan perluasan akses serta peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.



# KEBIJAKAN POKOK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL

- A. Pemerataan dan Perluasan Akses
- B. Peningkatan Mutu Pendidikan, Relevansi, dan Daya Saing
- C. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik.

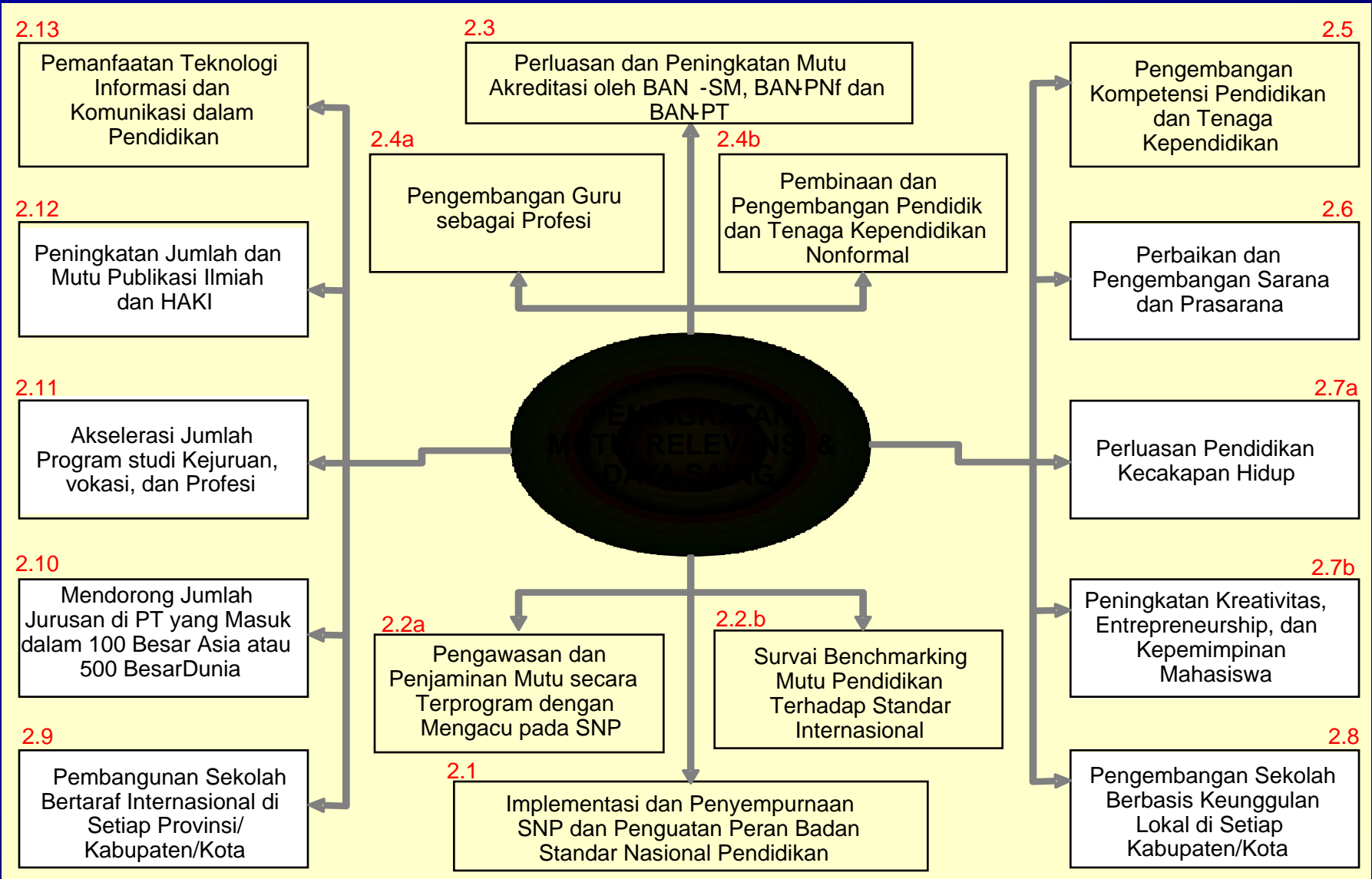




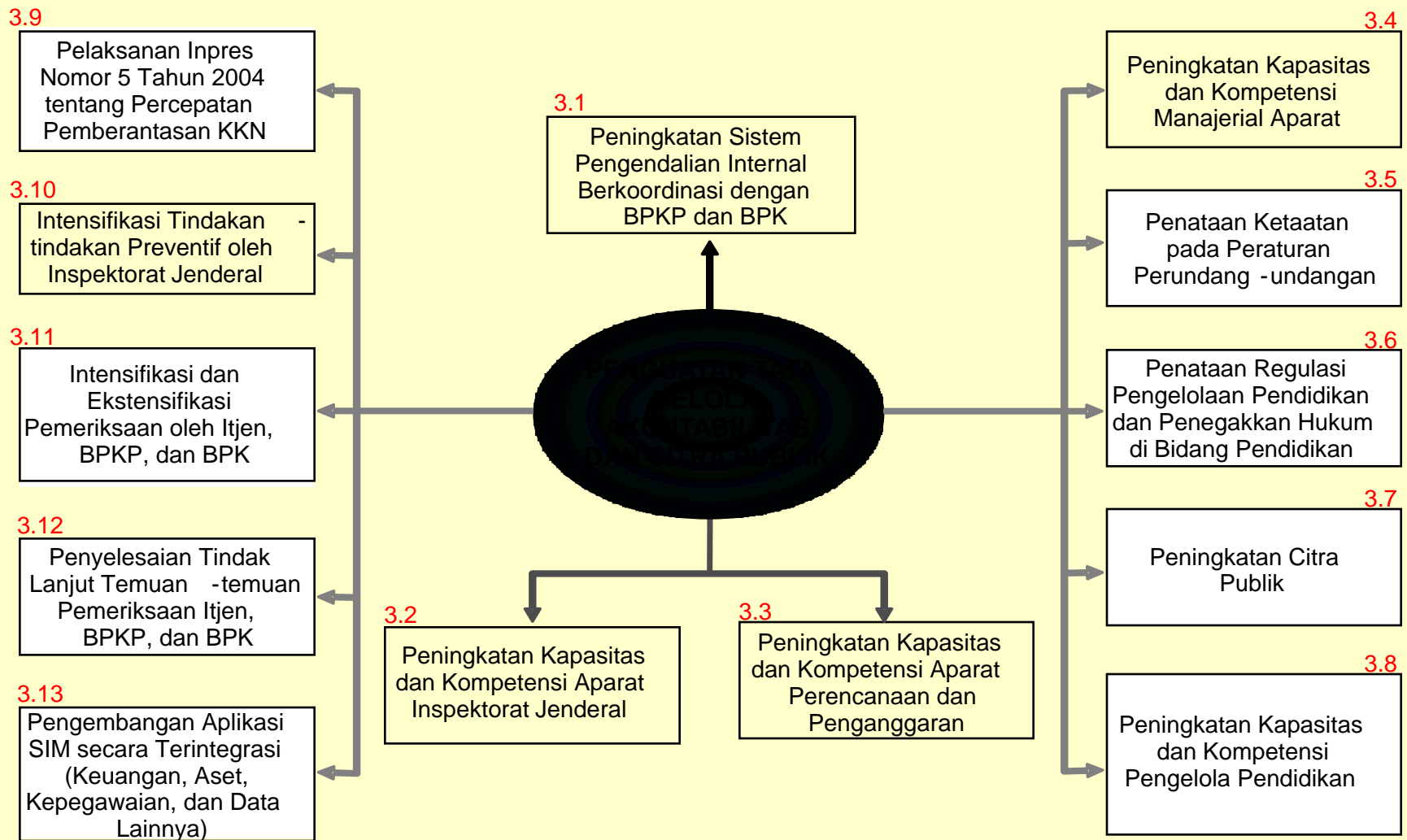
# KEBIJAKAN DALAM PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN



# KEBIJAKAN DALAM PENINGKATAN MUTU, RELEVANSI, DAN DAYA SAING



# KEBIJAKAN DALAM PENGUATAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS, DAN PENCITRAAN PUBLIK



# RENCANA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL JANGKA PANJANG

A. Periode 2005 - 2010

Peningkatan Kapasitas dan Modernisasi

B. Periode 2010 - 2015

Penguatan Pelayanan

C. Periode 2015 - 2020

Daya Saing Regional

D. Periode 2020 - 2025

Daya Saing Internasional



# RENCANA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL JANGKA MENENGAH 2005 - 2009

Program pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009 diarahkan pada upaya mewujudkan kondisi yang diharapkan pada tahun 2009 yang difokuskan pada:

- (1) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan,
- (2) Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing,
- (3) Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik.



# Program Pendidikan Nasional

	Das Sein	RENSTRA DEPDIKNAS Tahun 2005-2009	Das Sollen
Akses Pendidikan	<p>1. Indeks Pembangunan Manusia 110 (2005)</p> <p>2. Anak tidak bersekolah 3.2% untuk usia 7-12 dan 16.5% untuk usia 13-15</p> <p>3. APK SMP/MTs = 81.22%; APK Perguruan Tinggi 14.62% (2004)</p> <p>4. Terjadi kesenjangan akses pendidikan menurut kategori perkotaan &amp; pedesaan; serta mampu dan tidak mampu secara ekonomis.</p> <p>5. Angka kesenjangan cenderung naik di tingkat pendidikan menengah dan perguruan tinggi</p> <p>6. Penduduk ≥ 15 tahun yang buta aksara 15,4 juta atau 10,21%.</p>	<p>1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p> <p>2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun</p> <p>3. Program Pendidikan Menengah</p> <p>4. Program Pendidikan Tinggi</p> <p>5. Program Pendidikan Nonformal</p> <p>6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p>7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</p> <p>8. Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan</p> <p>9. Program Penelitian dan Pengembangan Iptek</p> <p>10. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</p> <p>Program-program Lainnya</p> <p>1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarus-utamaan Gender dan Anak</p> <p>2. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara</p> <p>3. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan</p> <p>4. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur</p> <p>5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunkan angka buta aksara penduduk usia &gt; 15 hingga 5%</li> <li>• APK SMP/MTs = 98%; APK Perguruan Tinggi = 18%</li> <li>• Memberi kesempatan yang sama pada seluruh peserta didik dari berbagai golongan menurut kategori tingkat ekonomi, gender, wilayah, tingkat kemampuan intelektual dan kondusifitas</li> <li>• Memperluas daya tampung satuan pendidikan sesuai dengan prioritas nasional</li> <li>• Penggunaan TIK untuk menjangkau daerah terpencil/sulit dijangkau</li> </ul>
Mutu Pendidikan	<p>Peringkat Internasional Indonesia (12 dari 12) terkait dengan tingkat relevansi sistem pendidikan Indonesia dengan kebutuhan pembangunan. Beberapa penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesiapan fisik siswa yang cenderung minim (akibat kekurangan gizi)</li> <li>• 40% tenaga pengajar memiliki keahlian yang tidak sesuai dengan bidang pengajarannya</li> <li>• Ketidaksiapan tenaga pengajar (kualitas dan kuantitas) ditingkat dasar hingga menengah</li> <li>• 23.3% ruang belajar SD rusak berat, 34.6% rusak ringan</li> <li>• Alokasi biaya pendidikan dari APBN &lt; 9%</li> <li>• Rendahnya kemampuan wirausaha, 82.2% lulusan Perguruan Tinggi menjadi karyawan</li> <li>• Kebutuhan guru 218.000 orang (2005)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan mutu pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP)</li> <li>• Peningkatan taraf hidup masyarakat dan daya saing tenaga kerja Indonesia</li> <li>• Metoda pembelajaran formal dan nonformal yang efisien, menyenangkan dan mencerdaskan</li> <li>• Seimbang antara pengembangan kecerdasan rasional (berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) dan kecerdasan emosional, sosial, spritual</li> <li>• 70% dosen dengan berpendidikan S2/S3</li> <li>• 50% sarana sekolah memenuhi SNP</li> <li>• Anggaran pendidikan dari APBN = 20%</li> <li>• 5 prodi PT masuk dalam 100 besar PT di Asia atau 500 besar dunia</li> </ul>
Tata Kelola Depdiknas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8.817 temuan/kasus penyimpangan sumber dana pembangunan (1997-2004)</li> <li>• Desentralisasi pendidikan</li> <li>• Kendali pemerintah yang belum berjalan optimal karena kurang ditunjang oleh sistem informasi manajemen yang terbangun dengan baik</li> <li>• SNP mulai dikembangkan</li> <li>• Laporan Keuangan dengan opini <i>disclaimer</i> dari BPK</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen perubahan secara internal yang menjamin terjadinya perubahan secara berkelanjutan</li> <li>• Sistem pembiayaan berbasis kinerja (ditingkat satuan pendidikan dan pemerintah daerah)</li> <li>• Manajemen berbasis sekolah (MBS) mulai SD sampai dengan SM</li> <li>• Disiplin kerja tinggi melalui internalisasi etos kerja</li> <li>• Satuan dan program pendidikan yang ada pada setiap tingkatan pemerintahan mencapai status kapasitas tertinggi dan memenuhi standar SNP</li> <li>• Penerapan TIK secara optimal pada manajemen pendidikan yang transparan dan akuntabel</li> <li>• Laporan Keuangan dengan opini WTS dari BPK</li> </ul>

# SASARAN JUMLAH PESERTA DIDIK

(ribu orang)

KOMPONEN	Tahun Ajaran					
	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
<b>Jumlah Penduduk</b>						
- Usia 0 – 3 Tahun	16.256,6	16.374,3	16.370,2	16.363,0	16.350,9	16.335,2
- Usia 4 – 6 Tahun	11.859,4	11.561,4	11.697,9	11.828,4	11.955,0	12.076,3
- Usia 7 – 12 Tahun	23.308,6	25.144,0	24.835,7	24.528,3	24.218,6	23.910,0
- Usia 13 – 15 Tahun	13.033,7	13.100,7	12.934,1	12.769,1	12.603,9	12.440,2
- Usia 16 – 18 Tahun	12.631,6	12.601,6	12.725,1	12.845,0	12.961,3	13.073,7
- Usia 19 – 24 Tahun	25.112,3	25.306,6	25.318,1	25.324,5	25.322,5	25.311,9
- Usia 15 Tahun Ke atas	149.956,3	152.961,4	155.816,6	158.707,2	161.638,2	164.605,0
- Total Jumlah Penduduk	216.415,1	219.141,8	221.654,3	224.196,0	226.766,6	229.366,7
<b>Jumlah Peserta Didik</b>						
- SD / MI & yang sederajat	29.075,1	28.813,8	28.533,0	28.121,2	27.827,6	27.678,8
- SMP / MTs & yang sederajat	10.476,3	10.858,6	11.238,1	11.717,3	12.604,6	12.202,7
- SMA/SMK/MA & yang sederajat	6.508,9	6.845,1	7.279,3	7.800,3	8.413,8	9.065,9
- PT/PTA/PTK	3.671,8	3.796,4	3.940,0	4.088,0	4.240,4	4.556,5





# Indikator Kunci dan Target Pilar Kebijakan

## -- Akses Pendidikan --

NO	SASARAN	INDIKATOR KUNCI	KONDISI DAN TARGET					
			2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Perluasan Akses Pendidikan	• APK Pra Sekolah	39,09%	42,34%	45,19%	48,07%	50,47%	53,90%
		• APM SD/Paket A/MI/SDLB	94.12%	94.30%	94.48%	94.66%	94.81%	95.00%
		• APK SMP/Paket B/MTs/SMPLB	81.22%	85.22%	88.50%	91.75%	95.00%	98.00%
		• APK SMA/SMK/Paket C/MA/SMALB	48.25%	52.20%	56.20%	60.20%	64.20%	68.20%
		• APK PT/PTA, termasuk UT	14.62%	15.00%	15.57%	16.38%	17.19%	18.00%
		• Prosentase Buta Aksara > 15 th	10.21%	9.55%	8.44%	7.33%	6.22%	5.00%
2	Pemerataan Akses Pendidikan	• Disparitas APK PAUD antara kab dan kota	16.94	16.94	15.54	14.04	12.54	11.04
		• Disparitas APK SD/MI/SDLB antara kab dan kota	2.49	2.49	2.40	2.30	2.15	2.00
		• Disparitas APK SMP/MTs/SMPLB antara kab dan kota	25.14	25.14	23.00	19.00	16.00	13.00
		• Disparitas APK SMA/MA/SMK/SMALB antara kab dan kota	33.13	33.13	31.00	29.00	27.00	25.00
		• Disparitas gender APK di jenjang pendidikan Menengah	6,16	6,07	5,98	5,89	5,80	5,71
		• Disparitas gender APK di jenjang pendidikan tinggi	9,90	9,62	9,33	9,05	8,76	8,48
		• Disparitas gender persentase buta aksara	7.32	6.59	5.86	5,13	4.40	3.65

# INDIKATOR KUNCI DAN TARGET IMPLEMENTASI PILAR KEBIJAKAN

## -- MUTU, RELEVANSI, DAN DAYA SAING --

NO.	SASARAN	INDIKATOR KUNCI	KONDISI DAN TARGET					
			2004	2005	2006	2007	2008	2009
3	Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan	• Rata-rata nilai UN SD/MI	-	-	-	-	5.00	5.50
		• Rata-rata nilai UN SMP/MTs	5.26	6.28	6.54	6.72	7.00	7.00
		• Rata-rata nilai UN SMA/SMK/MA	5.31	6.52	6.68	6.84	7.00	7.00
		• Guru yg memenuhi kualifikasi S1/DIV	30%	30%	32%	34%	37.5%	40%
		• Dosen yg memenuhi kualifikasi S2/S3	50%	50%	55%	60%	65%	70%
		• Pendidik yang memiliki sertifikat pendidik	-	-	-	5%	20%	40%
		• Jumlah Prodi masuk 100 besar Asia, 500 besar Dunia, atau akreditasi bertaraf OECD/Int.	-	1	3	4	5	10
		• Perolehan medali emas pd Olimpiade Int.	13	15	17	19	20	20
		• Jumlah Paten yg diperoleh	5	10	20	30	40	50
		• Sekolah/Madrasah bertaraf Internasional	-	-	50	85	120	155
		• Sekolah/Madrasah berbasis keunggulan lokal	-	100	400	700	1.000	1.333
4	Peningkatan Relevansi Pendidikan	• Kenaikan Publikasi Internasional	5.0%	7.5%	10%	20%	30%	40%
		• Rasio Jumlah Murid SMK : SMA	30:70	32:68	34:66	36:64	38:62	40:60
		• APK PT vokasi (D2/D3/D4/Politeknik)	1.47%	1.50%	1.70%	1.80%	1.90%	2.00%
		• Rasio Jumlah mahasiswa Profesi terhadap jumlah lulusan S1/D4	10%	10%	15%	17.5%	20%	20%
		• Persentase peserta pendidikan life skill terhadap lulusan SMP/MTs atau SMA/SMK/MA yang tidak melanjutkan.	5.0%	6.5%	8.6%	10.7%	12.8%	15.0%
		• Jumlah sertifikat Kompetensi yg diterbitkan						

# INDIKATOR KUNCI DAN TARGET PILAR KEBIJAKAN

## -- TATA KELOLA, AKUNTABILITAS DAN CITRA PUBLIK --

No	SASARAN	INDIKATOR KUNCI	KONDISI DAN TARGET					
			2004	2005	2006	2007	2008	2009
5	Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik Pendidikan	• Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah	Dis-claimer	Dis-claimer	Wajar Dgn Catatan	Wajar Tanpa Sarat	Wajar Tanpa Sarat	Wajar Tanpa Sarat
		• Persentase temuan BPK ttg penyimpangan di Pemerintah terhadap obyek yang diperiksa	1~0,5%	1~0,5%	1~0,5%	<0.5%	<0.5%	<0.5%
		• Persentase temuan Itjen ttg penyimpangan di Pemerintah terhadap obyek yang diperiksa	1~0,5%	1~0,5%	1~0,5%	<0.5%	<0.5%	<0.5%
		• Aplikasi SIM	-	-	2 Aplikasi	14 Aplikasi	-	-
		• Sertifikat mutu layanan yg diraih Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama	-	-	-	-	-	80% unit utama memperoleh ISO 9001:2000
• Sertifikat mutu layanan yg diraih LPMP/PPPG/BPPLSP	-	9 ISO 9001: 2000	25 ISO 9001: 2000	43 ISO 9001: 2000	47 ISO 9001: 2000	-		



**Selesai**

